Journal of Politics and Policy Volume 2, Number 2, Juni 2020

Elite Rationality, Traditions and Pragmatic Politicians.

Rasionalitas Elit, Tradisi Dan Politisi Pragmatis

Mahatva Yoga Adi Pradana

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta, Indonesia

mahatva.pradana@uin-suka.ac.id

Abstract

The movement of politicians is a common phenomenon when elections will take place. Where the behavior of politicians who migrated has even become tradition. See the phenomenon happening in Indonesia today. The politicians seemed to be looking for a shortcut to gain power easily. Become a populist figure to lift personal imagery for an interest. The realization of the strategy was done by changing the party suit with all the ideology and rationality of his thinking. Even the converted politicians should willingly put off his identity as an idealistic politician in order to akomodir his political interests. Various political strategies were made by making noise by raising political content and hoax preaching. This article seeks to see how closely the politicians are thinking with pragmatism through its political traditions and strategies. In addition to the current digital age, the elite behavior creates a new political space with accommodation issues that are not necessarily the truth by raising alternative facts to form new truths. This is the post-truth era that requires politicians to start thinking rational in asserting his authority. However, it does not have a major impact on the policies to be produced.

***Key Words** : Politician, Tradition, Pragmatism*

Abstrak

Perpindahan politisi merupakan fenomena yang biasa ketika pemilihan umum akan berlangsung. Dimana perilaku politisi yang berpindah bahkan sudah menjadi tradisi. Melihat fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini. Para politisi seakan mencari jalan pintas untuk mendapatkan kekuasaan dengan mudah. Menjadi figur populis untuk mengangkat citra pribadi demi sebuah kepentingan. Perwujudan strategi itu dilakukan dengan cara berubah baju partai dengan segala ideologi dan rasionalitas pemikirannya. Bahkan para politisi yang berpindah tersebut harus rela menanggalkan identitasnya sebagai politisi idealis demi di akomodir kepentingan politiknya. Bermacam strategi politik dilakukan diantaranya membuat kegaduhan dengan memunculkan konten politik serta pemberitaan yang bersifat hoaks. Artikel ini berusaha melihat seberapa dekat pemikiran para politisi dengan politik pragmatism melalui tradisi dan

strategi politiknya. Selain itu dalam era digital saat ini, perilaku elit menciptakan ruang politik baru dengan akomodasi isu-isu yang belum tentu kebenarannya dengan memunculkan fakta alternatif guna membentuk kebenaran baru. Inilah era pasca kebenaran yang mengharuskan para politisi mulai berfikir rasional dalam menegaskan kekuasaannya. Namun tidak memberikan dampak yang besar terhadap kebijakan yang akan dihasilkan.

Kata Kunci ; Politisi, Tradisi, Pragmatisme

PENDAHULUAN

Tulisan ini mencoba untuk menunjukkan sejauh mana perilaku elit politik yang menggunakan pragmatism sebagai *way of life*. Negara ini telah melewati pemilu 2019 dengan penuh drama dan kejadian luar biasa. (Kompas, 2019) Salah satu yang menarik perhatian masyarakat dari drama yang terjadi tentang *hastag-hastag* yang bermunculan ramai di dunia maya dan bahkan sempat meraih trending. Sebut saja *#2019GantiPresiden, #2019tetapJokowi* dan beragam *hastag* serta *meme* lucu. Selain membanjiri dunia maya, banyak elit politik yang melakukan *manuver* dalam berbagai langkah dan strategi politiknya. Seperti strategi partai-partai baru masuk ke dalam koalisi pemerintahan dalam mendukung presiden petahana. (CNNIndonesia, 2018) Banyak yang mengatakan bahwa politik adalah jalan untuk mendapatkan kekuasaan, Mengutip ungkapan Harold Laswell sesuai yang dikemukakan tentang politik *"who gets what, when and how"*. (Laswell, 1936) Dalam kontestasi politik yang berlangsung 2019 lalu, banyak elit politik menjadi aktor penguasa media. Salah satu konglomerasi media di Indonesia telah membawa Hary Tanoe untuk membentuk Partai Perindo, setelah kita mengetahui sebelumnya dirinya merupakan Dewan Penasehat Partai Hanura.(Khamim & Sabri, 2019) Seperti halnya kebangkitan populisme dalam era kontemporer pada kemenangan Trump dan Brexit.(Ronald & Norris, 2016) Fenomena ini menegaskan bahwa politisi menciptakan ruang kampanye dengan menjadi tim sukses dari masing-masing kubu. Dalam tradisi politik, kekuasaan tetaplah menjadi raja, dimana terus diperebutkan oleh para politisi sebagai bentuk legitimasi.

Secara umum perilaku yang dipraktekkan oleh para politisi ini disebut sebagai pragmatism. Meskipun hanya dilihat dalam konteks makro, perilaku politisi yang menghalalkan segala cara demi kepentingan individu dan kelompok saat pemilukada bisa dikatakan demikian. Sebagai bentuk kekuasaan yang telah di dapatkan para politisi layak disebut elit. Harold Laswell mengatakan bahwa elit yang berkuasa merupakan suatu kelas yang terdiri dari mereka yang berhasil menempati kedudukan dominasi dalam masyarakat, dalam arti bahwa nilai yang mereka bentuk mendapatkan penilaian dari masyarakat sebagai konstituen. (Soemardi, 1984) Salah satu tradisi politik para

politisi ini adalah sering berpindah-pindahnya dalam lintas ideologi partai beserta platformnya untuk mengejar popularitas yang dijadikan *role model* pada strategi kampanye. Sejatinya kekuasaan politik memang tidak diberikan secara turun temurun dalam sistem demokrasi di Indonesia, namun kekuasaan dapat di berikan melalui sistem yang dibangun serta dibentuk oleh penguasa. Tradisi ini erat dengan ketua partai memberikan jabatan utama di partainya kepada kolega ataupun anaknya.(Susanti, 2018)

Wujud manuver yang dilakukan politisi adalah dengan berpindah partai politik. Perilaku ini sebagai bentuk kepentingan akan kekuasan. Perpindahan ini merupakan satu dari dampak adanya populisme elit.(Choiriyati, 2018) Kompetisi antar elit populis sejatinya nampak dalam dua skema kekuatan besar pada pemilu 2019. Pada saat itu Prabowo menunjukkan pemikiran yang sangat nasionalis, sedang Jokowi menampilkan *pragmatism nir-ideologis* dimana program-program kerakyatan menjadi strategi utama.(Mietzner, n.d.) Semua dilakukan ditunjukkan dalam rangka meraup popularitas pada masa pemilihan dengan maksimal. Politisi mencari kepercayaan masyarakat sebagai bentuk pengaruh atas kekuasaan di parlemen nantinya. Semua itu dilakukan karena masyarakat menjadi alat perantara kebutuhan sosial dan skema politik itu sendiri. Sehingga dalam perilaku politiknya para elit tidak bisa lepas dari peranan sekelompok masyarakat yang memilih serta dipilih. Karena pada dasarnya masyarakat yang menjadi pelaku politik itu sendiri.

Pada saat ini, keberlanjutan atas manuver politik dengan banyaknya partai politik memilih artis atau selebritis tanah air. Manuver itu dilakukan sebagai pertukaran politik dengan dijadikan artis sebagai anggota partai dan mendapat kursi calon tetap. Strategi politik itu dikarenakan para artis memiliki tingkat popularitas. Selain juga untuk meningkatkan elektabilitas, dipilihnya artis juga dapat mendapat simpati masyarakat pada saat melakukan kampanye daerah. Meskipun kerap kali kinerja dari para selebritis tersebut tidak menjamin, ketika hanya mengandalkan kepopulerannya.(Ni'mah, 2016) Karena yang sebenarnya partai politik butuhkan dalam kontetasi politik adalah kinerja optimal yang dapat menjadikan mesin politik partai menjadi lebih baik dari sebelumnya. Meskipun partai politik tidak mendahulukan kader yang selama ini di didik dalam mesin partai.

METODE

Tulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan konseptual. Seperti yang dikemukakan oleh Jan Jonker,dkk (2011) bahwa model

konseptual membuat peneliti dapat menunjukkan fenomena yang di jabarkan dalam penelitiannya. Selain itu tujuan peneliti menggunakan model konseptual ini dapat membantu dalam penataan permasalahan identifikasi faktor, yang kemudian memberikan hubungan dalam memetakan bingkai masalahnya. Penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sekunder berupa data kepustakaan. Seperti Koran, jurnal ilmiah, majalah, naskah, dan segala jenis dokumen yang relevan (Sugiyono, 2008). Selain itu dalam tulisan ini juga menggunakan kajian *literature review* sebagai dasar acuan tulisan ini dibuat. Disini penulis menjelaskan bahwa perilaku politisi saat ini berkaitan erat dengan rasionalitas yang mereka miliki. Dimana keuntungan serta kepuasaan individu menjadi kebenaran yang harus politisi laksanakan. Pada akhirnya tindakan yang dilakukan oleh banyak politisi ini menjadi tradisi yang lazim dilakukan pada saat mendekati musim pemilu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekilas tentang Pragmatisme

Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani, yang berarti *pragma* merupakan perbuatan atau tindakan dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *pragmatic* yang merupakan berkenaan dengan hasil praktik. (Zaprulkhan, 2016) Pada terjemahan yang beraal dari *Encyclopedia of Knowledge* merupakan sebuah gerakan filosofis yang menyatakan makna dan kebenaran dari setiap gagasan adalah fungsi dari hasil praktisnya. (Aartolahti, 1997). William James (1842-1910) merupakan tokoh yang memunculkan pemahaman pragmatism menjadi begitu dikenal hingga saat ini. Dalam bukunya yang berjudul *Pragmatism* (1907) dan *The Meaning of Truth* (1909), pemahaman akan pragmatism ini muncul seolah menguasai filsafat abad keduapuluh. Meskipun pemikiran James tidak lepas dari Sander Pierce (1839-194), namun dirinya telah mengubah konsep pragmatisme menjadi benar-benar hidup dalam kepentingan praktis yang ada dalam kehidupan manusia.

Melihat bahwa pragmatism berada dalam ranah praktik kehidupan manusia. Hal tersebut memiliki keterkaitan dengan adanya etika yang berhubungan dengan perilaku manusia. Keduanya jelas menghasilkan pemahaman baru yang melihat tentang baik buruknya tindakan manusia dari segi manfaatnya. (Suseno, 1991) Sejatinya pragmatisme ini memiliki kesamaan dengan utilitarianisme yang sama-sama ingin mencapai kepuasan, manfaat dan kebahagiaan. Oleh karena itu pragmatisme memandang suatu hal baik dan bermoral merupakan suatu kehidupan yang dapat

dirasakan dengan sangat memuaskan. (W.Burk, 1958).Pada kelahirannya, filsafat pragmatismeawal yang di kemukakan oleh Pierce selalu identik dengan mencari kebenaran sekaligus mendatangkan kebenaran tersebut. Semua itu dikarenakan bangsa Amerika mengukur kedudukannya sebagai manusia dari banyaknya materi. (Mas'ud, 2015)

Jadi dapat dilihat bahwa yang terjadi pragmatism tidak hanya digunakan untuk mencari kebenaran melainkan juga ditentukan oleh etika dengan tetap memperhatikan kepuasan individu. Melihat apa yang dikemukakan oleh Pierce kemuda James, terlihat jelas bahwa prinsip mendasar pemahaman pragmatism ini berkaitan dengan materi yang di peroleh individu dalam keadaan puas diri tanpa memperhatikan etika serta moral yang dilakukan. Semua ini karena sifat yang dimiliki manusia, dimana manusia hidup identik dengan kepuasan.

Hilangnya Identitas Politisi

Dalam pendekatan yang lebih menyeluruh, para elit menegaskan bahwa kekuatan ideologis mereka menjadi alat utama kekuasaan. Ini di dasarkan pada pilihan partai politik yang mereka jadikan kendaraan. Perilaku para elit menjadi sorotan tajam media. (Kompas, 2017) Melihat perilaku setiap elit, setidaknya tercermin pada budaya politik yang elit gunakan. Mengingat bahwa pendekatan ini merupakan unit analisa yang paling dekat dengan elit. Terbukti ada satu kegaduhan yang membuat para elit penguasa saling memberikan komentar atas perilaku elit dibawahnya. Yang paling di ingat adalah kasus yang menimpa Ratna Sarumpaet. Ketika satu bukti foto serta pernyataan individu dijadikan alat utama untuk menegaskan tindakan yang terjadi kepada individu tersebut. Selanjutnya semakin banyak elit penguasa yang bersimpati dan berkomentar, selain para elit juga mengutuk keras tindakan itu. Disinilah masyarakat merasakan dampak yang besar, ketika figur yang mereka jadikan pedoman menjadi pesakitan. (Gutari, 2017) Fenomena ini melihat bahwa kedekatan elit dengan para penguasa diluar kekuasaan. Membentuk relasi yang menarik bahwa tradisi elit dalam meraih popularitas identik dengan membentuk serta membangun berita bohong.

Identitas elit politik yang berubah-ubah membuat masyarakat semakin hilang kepercayaan. Terbukti ada beberapa figur anggota partai yang gagal menjadi anggota legislatif. Meskipun elit tersebut selalu berkomentar dan menjadi tameng atas pesakitan para elit pusat. (CNNIndonesia, 2019) Dalam keilmuan yang seperti ini, tradisi politik para elit berkembang menjadi strategi politiknya. Adapun ideologi yang merupakan

seperangkat keyakinan yang dipengaruhi oleh budaya politik dan kemudian kerap memberikan pengaruh terhadap tuntunan elit dalam bertindak dan berperilaku. Terkait dengan perilaku elit yang seperti ini, tradisi politik pada akhirnya terkait dengan norma dan nilai-nilai sikap yang dijadikan pegangan aktivitas berpolitik oleh para elit.(Yunus, n.d.)

Dalam konteks politik kekinian, semakin elit politik dekat dengan kekuasaan di pusat, semakin jauh dirinya dengan masalah. Pandangan ini dikarenakan kedekatan sosial masih menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan sebuah kasus. Pada masa sekarang politik dilihat sebagai sebuah produk untuk mendapatkan kekuasaan. Saat ini partai politik sering menggunakan keilmuannya hanya untuk menjatuhkan lawan. Inilah fase dimana politik sering dijadikan lelucon oleh banyak pihak. Seperti politik " *poli artinya banyak, tik artinya taktik* " banyak taktik yang harus dilakukan dan diciptakan hanya untuk meraup hasil sebesar-besarnya, menegaskan kekuasaan yang sekuat-kuatnya, dan memperoleh kewenangan yang mutlak. Perilaku inilah yang sering dirasakan oleh masyarakat pada masa pemilihan umum.

Setiap elit politik yang berkontestasi sejatinya harus memiliki strategi yang tepat untuk mendapatkan kekuasaan. Berpindahnya elit dari satu partai ke partai yang lain atau dari satu kubu kekubu yang lain, menunjukkan bahwa elit tersebut sedang mencari kendaraan yang sesuai untuk agenda politiknya. (Beritagar, 2019) Berpindah partai memang lazim dilakukan oleh para elit, sudah ada banyak contohnya, apalagi elit tersebut merupakan produk orde baru hingga era reformasi kini. Bahkan masyarakat melihatnya sebagai kekuasaan yang langgeng. Tetap berada dalam pusaran kekuasaan pusat meskipun rezim telah berganti-ganti. Hal inilah yan disebut sebagai politik kepentingan. Hijrahnya para elit politik untuk sebuah kepentingan inilah yang membuat masyarakat semakin mengerti tentang perilaku dan identitas elit tersebut. Sebagian masyarakat melihat politik sebagai alat untuk meraih banyak kepentingan yang di dasarkan pada prioritas pribadinya.

Seperti halnya dalam pemilu legislatif 2019 yang lalu, konteks kampanye yang dilakukan oleh para elit yang merupakan calon legislatif hanya sebatas formalitas dan pragmatis. Simbol-simbol kepartaian digunakan sebagai alat pertukaran sosial dengan para konstituen. Dengan mekanisme proporsional terbuka yang mengharuskan elit untuk bisa bergerak langsung kepada masyarakat pemilihnya, nyatanya masih banyak yang hanya mengandalkan figur terkenal sebagai sokongan. Selain itu masih adanya praktek-praktek memberikan barang dan uang sebagai bentuk imbal balik ketika mereka

mau memilih nantinya. (VOAIndonesia, 2019) Dari hasil penelitian yang ada, menunjukkan bahwa insiden politik uang terjadi secara masif dalam Pemilu 2019. Dilihat dari berbagai macam metode pengukuran, politik uang berkisar antara 19,4% hingga 33,1% tergantung pertanyaan dan jumlah skalanya. Pada Pemilu 2019, Daftar Pemilih Tetap (DPT) kita mencapai sekitar 192 juta orang. Kisaran antara 19% dan 33,1% berarti diperkirakan antara 37,3 juta hingga 63,5 juta pemilih terpapar praktik haram politik uang. (Muhtadi, 2019)

Dari fenomena ini menunjukkan bahwa hijrahnya elit politik dengan menggunakan mesin partai yang baru tidak serta merta memuluskan kepentingannya. Tradisi loncat partai seakan menjadi strategi yang kuat untuk mendapatkan suara. Meskipun masih harus melalui proes sosialisasi, komunikasi dan tawar menawar. Semua ini dilakukan karena para elit masih harus mendapatkan kepercayaan publik. Namun hal yang harus menjadi ungkapan kebenaran, bahwa masyarakat melihat platform ideologi partai masih berpengaruh kuat terhadap rasionalitas pilihan masyarakat. Atau dalam bahasa millenials, *"bukan kaleng-kaleng*".

Perilaku Politisi yang Berpindah-pindah

Iklim politik Indonesia memang begitu dinamis. Para elit dapat bergerak sesuai dengan kehendak politik mereka. Perilaku berpindah-pindah pun telah menjadi agenda tahunan, bahkan setiap periode pemilu ada elit yang maju dengan latar belakang partai yang berbeda. Wajar dalam celotehan masyarakat jawa bahwa "*isuk kedele, sore tempe*". Ini menunjukkan betapa cepat berubahnya omongan serta tindakan para politisi. Dalam kontestasi politik nasional, kita melihat fenomena berpindahnya elit politik sebagai kutu loncat, dengan gambaran bahwa perilaku politik para elit di dasarkan pada kekuasaan, bukan pada menciptakan perubahan yang baik di masyarakat. Pada pemahaman yang sama, sebagian masyarakat menganggapnya sedang berhijrah, meskipun hijrah merupakan hal yang mencari kebaikan dari akibat buruk yang sudah pernah diperbuat. Namun hijrahnya elit politik lebih di dasarkan pada kebaikan individu untuk menegaskan kekuasaannya dalam politik.

Biasanya para elit memiliki afiliasi dengan tokoh partai politik yang dianggap memiliki *bargaining position* dengan penguasa. Dari sini strategi utama yang dilakukan dengan ikut tergabung dalam tim suksesnya. Melihat pada pemilu sebelumnya (2014-2019) alasan yang mendasar elit politik berpindah terletak pada populisme yang memiliki akar sejarah pada kontestasi politik nasional. Era itu dimulai awal

kemerdekaan dan mulailah muncul populisme nasionalis-kerakyatan dengan rezim otoriter pada Demokasi Terpimpin.(Hadiz & Robison, 2017) Perilaku itu dilakukan dalam rangka menciptakan *image* di masyarakat bahwa elit tersebut dekat dengan penguasa. Tindakan yang dilakukan oleh elit semakin menegaskan *pragmatism* di era pasca kebenaran tindakan yang dilakukan memang menjadi kebenaran tersendiri bagi masyarakat. Menciptakan *branding* populis namun dengan kinerja yang belum tentu teruji. Bahkan elit sengaja melakukan tindakan yang membuat masyarakat terpecah belah dan percaya terhadap tindakan yang dilakukan oleh para elit politik.

Ketika memahami konsep pasca kebenaran tentu sangat terasa di Indonesia, ini bemula dari pernyataan Jokowi tentang suasana politik yang dijejali dengan berbagai kabar bohong secara berulang kali, sehingga post-truth benar-benar terjadi. (Tempo, 2019) Kondisi tersebut berkaitan dengan keadaan fakta objektif yang kurang berpengaruh dalam membentuk opini di masyarakat dari pada menarik emosi dan kepercayaan. Kekuasaan lain dalam gerakan politik dan tokoh populis otoriter itulah yang dengan sengaja membuat fakta alternatif sebagai entitas tandingan.(Harsin, 2015)

Berpindahnya elit politik tentu saja berkaitan dengan kepentingan. Dimana politik identik dengan kekuasaan, kewenangan dan legitimasi. Ketiga pemahaman ini menciptakan sebuah pola yang terus menjadi panduan elit politik dalam berkontestasi. Dalam pandangan Gudio Dorso, seorang theorist asal Italia, menyebutkan bahwa dalam suatu struktur masyarakat terdapat satu dikotomi, yaitu dua kelompok yang memainkan peran sebagai kelas yang memerintah dan yang berperan sebagai kelas yang diperintah. Kelas yang memerintah ini jelas memiliki power dan kuasa atas kelas yang diperintah. (Hagopian, 1978) Pandangan ini sejalan dengan realita politik yang ada di Indonesia, bahwa adanya strata politik menyebabkan para elit yang tidak sejalan berupaya untuk mengamankan diri dengan mencari pengakuan di partai lain.

Berbeda dengan pandangan Robert Putnam, ada beberapa identifikasi yang dilakukan untuk melihat berpindahnya elit politik yakni dilihat dari posisinya, reputasi kinerjanya, dan kebijakan yang dibuat. Sejatinya posisi dan reputasi menunjukkan seberapa besar pengaruh elit dalam membuat kebijakan yang akan dirasakan oleh masyarakat. Dalam penjelasannya Putnam juga menggambarkannya dalam piramida kekuasaan. Semakin tinggi ke atas, semakin besar kekuasaan dan pengaruhnya bagi elemen bawahnya. Stratifikasi politik inilah yang juga menyebabkan sirkulasi kepentingan serta tumpang tindih kekuasaan.(Farisi, 2017) Apabila elit politik yang tidak mendapatkan posisi dan juga kewenangan dalam kebijakan, selamanya elit

tersebut akan menjadi politisi lapis kedua. Oleh karena itu dalam strateginya elit harus berpindah.

Tindakan elit dalam menegaskan kekuasaanya tidak serta merta harus mendapat arahan koleganya. Yang harus dipahami elit adalah kendaraan yang akan mengantarkan dirinya untuk bisa mengikuti kontestasi politik. Sebagian besar mereka berpandangan bahwa masyarakat hanya dijadikan objek dalam politik. Hanya sebatas dibutuhkan pada saat proses pemilihan berlangsung. Satu suara menentukan nasib bangsa lima tahun kedepan. Namun satu suara sebagai bukti legitimasi elit terhadap kebijakan yang masyarakat rasakan nanti. Rasionalitas elit menjadi agenda yang sering diperdebatkan. Kadangkala elit harus mengaburkan ideologisnya sebagai bentuk kekuasaan yang akan mereka raih. Selain itu mereka juga harus membuang jauh perasaan sakit hati apabila pililihan politik yang mereka ambil justru akan membawa dampak buruk bagi keputusan politiknya.

Setiap kontestasi yang berafiliasi kekuasaan merupakan wujud dari legitimasi masyarakat akan pilihan terhadap elit. Sejatinya elit hanya membutuhkan dukungan dalam mekanisme pemilihan. Kekuasaan yang di dapatkan oleh elit tidak selamanya di identikan dengan kewenangan. Karena kewenangan harus di dasari legitimasi kekuasaan yang sah sesuai dengan aturan hukum. Laswell berpendapat, bahwa kewenangan merupakan kekuasaan formal yang biasanya dikeluarkan dalam bentuk peraturan-peraturannya. (Laswell, 1936) Oleh karena itu, masyarakat yang menjadi objek peraturanyang dibuat harus mengikuti dan menjadikannya kepatuhan. Posisi elit juga harus mendapatkan perhatian. Ada di bagian manakah elit tersebut berasal. Karena semakin tinggi posisi elit semakin besar pengaruh atas peraturan yang di buat

Dinamika politik Indonesia kini tidak lepas dari kekuasaan elit yang dengan sengaja menciptakan pembenaran secara sepihak atas kewenangan yang di lakukan. Para elit politik dalam meraup kekuasaan selalu membuat serta menciptakan gerakan-gerakan baru dan informasi-informasi yang belum benar kejelasannya. Pada era pasca kebenaran, kebohongan dianggap sebagai ancaman bagi demokrasi. Pilihan rasional elit dalam menciptakan sebuah isu tidak disertai dengan data dan fakta yang benar. Untuk menangkal itu semua ada strategi yang harus dilakukan oleh para elit. Yaitu dengan menciptakan counter strategi melalui pendekatan politisi, publik dan media. Ketiganya merupakan alat utama sistem informasi yang berperan menangkal adanya berita bohong.(Golose, 2019)

Melihat tiga pendekatan yang telah dikemukakan, politisi merupakan awal

mulanya ide gagasan tentang sebuah konten politik berasal. Pada saat konten tersebut mulai muncul di dalam ruang publik. Adanya media yang mengabarkan, dimana fungsi media sebagai alat transfer informasi. Secara tidak langsung ketiganya berperan untuk dapat meredam adanya kebohongan publik serta kegaduhan politik. Pada era pasca kebenaran, kebohongan yang diciptakan oleh para elit politik sering menjadi fakta alternatif bagi sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa fakta yang dimunculkan adalah sebuah kebenaran. Fenomena ini kita jumpai dalam tradisi politik masa kini. Adanya lembaga survey yang melakukan *tracking* hasil pemilu dengan menciptakan perang angka melalui *quick count* membuat masyarakat merasakan benar dampak informasi yang sebenarnya harus melalui sistem terlebih dahulu untuk menegaskan kemenangan salah satu pihak. Namun dengan adanya kewenangan media sebagai bagian dari kekuasaan modern, menunjukkan bahwa pendelegasian informasi harus berulang-ulang dan berkali-kali. (Kompasiana, 2019) Semua ini dilakukan atas dasar adanya pemberitaan tandingan yang mengatasnamakan kelompok tertentu. Dengan demikian apabila kekuasaan merujuk pada kewenangan suatu kelompok dalam distribusi informasi, akan ada banyak distribusi informasi yang muncul ketika semua elit saling memberikan komentarnya pada media.

Tumpang tindihnya kebenaran informasi yang ada, menjadi bahan ejekan masyarakat awam. Terlepas dari elit yang berkontestasi, perilaku elit yang berada dibalik kekuatan politik ini justru yang menimbulkan kegaduhan. Seringnya elit politik berpindah haluan, menyebabkan masyarakat juga bingung untuk menentukan pandangannya. Semua itu karena figur yang diharapkan mampu memberikan pencerahan, justru membuat kegaduhan politik. Secara rasional, masyarakat menerima informasi tersebut, namun secara kebenaran masih bertanya-tanya apakah benar demikian. Semakin berkuasanya elit, semakin kuat pula relasi dan penguatan media yang di dapatkan. Inilah yang membuat sebagian elit yang bertentangan mau ikut masuk ke dalam kelompok yang sama. Semua ini karena elit ingin mengamankan diri terlepas dari permasalahan politik yang diakibatkan menentang kekuasaan.

Tradisi Politisi Kekinian : *Hijrah*

Adanya tradisi elit berpindah-pindah ini menciptakan polarisasi baru dalam pemetaan politik Indonesia. Bukan saja berpindah platform partai, para elit juga berpindah idologi serta kepentingan untuk mengamankan posisi kekuasaan. Dalam era pasca kebenaran seperti saat ini, kecenderungan elit jauh lebih pragmatis dalam

melakukan gerakan politiknya. Pragmatisme politik dapat diartikan sebagai tindakan yang yang memperjuangkan atau mengamankan kepentingan elit untuk melihat serta memprediksi kekuasaan di masa mendatang.

Politik era pasca kebenaran tak ubahnya politik pragmatis, ketika ada kekuasaan yang memberikan keuntungan, maka di situlah para elit pragmatis berkumpul. Kepentingan politik dapat dilihat elit sebagai suatu bentuk kebutuhan pada kekuasaan. Karena dengan kepentingan yang elit buat dapat menciptakan relasi kekuasaan antar sesama elit. Para elit era pasca kebenaran di identikan dengan *framing* opini yang begitu besar dampaknya terhadap *backround* ideologi yang melekat. Setidaknya ini tercermin dalam beberapa tokoh yang saat ini berada di dalam lingkaran kekuasaan. Salah satu dampak yang terjadi adanya disinformasi yang banyak mendominasi media. Dimana media melakukan *framing* terhadap pemberitaan tertentu. Kemudian dibenturkan dengan elit politik yang bertentangan, di sisi lain ada kelompok elit yang memanfaatkan situasi untuk sebuah politisasi agama. Semua tindakan yang dilakukan sejatinya hanya menunjukkan fakta yang parsial. Tindakan para elit tersebut tentu berada dalam ruang publik.(Jinan, n.d.)

Elit politik dalam kontestasinya tidak lepas dari adanya simbol-simbol agama yang dijadikan alat pertukaran media sosial. Mengedepankan popularitas figur unggulan, meciptakan ruang dialog khusus, seta melakukan eksplorasi simbol-simbol untuk kepentingannya. Era pasca kebenaran yang melanda negara Indonesia tentu menimbulkan dampak. Selain adanya disinformasi, problematika ini memunculkan penggunaan media sosial yang begitu pesat yang menciptakan paradigma baru dalam perkembangan tradisi di masyarakat. Informasi yang merupakan *transfer authority* dari pusat ke daerah, kini hanya sebatas *power off distribution*. *Transfer authority* dimaknai sebagai pemberian wewenang yang dilakukan dalam rangka menciptakan transparansi informasi dari pusat ke daerah secara terstruktur. Namun dengan adanya tradisi baru ini, informasi hanya sebatas pendistribusian kekuasaan, dari pusat informasi ke juru bicara dan jubir mengkordinasikan dengan media-media yang ada. Model inilah yang di pandang sebagai manipulasi paradigma masyarakat melalui fakta-fakta alternatif. Yang terjadi saat ini adalah banyak munculnya berita-berita bohong, tindakan ekstremisme dan retorika palsu.

Bentuk kekuasaan yang dimiliki oleh elit nampak dengan keputusan politik yang dibuat saat elit berpindah partai. Dimana itu dimaknai sebagai hijrah. Hijrah menurut agama Islam dalam pengertianya, secara etimologi berasal dari bahasa arab *"isim*

masdar" dari kata *hajara-yahjuru-hajran* yang artinya meninggalkan, memutuskan. (Munawwir, 1997) Menurut pendapat ar-Rāghib al-Asfahānī ,al-Hijru atau al-Hijran yang artinya seseorang yang meninggalkan yang lainnya, baik secara fisik perkataan, bahkan hati. (Ar-Raghib, 2008) Dalam pemahaman awam, berpindahnya elit politik dalam upaya perpindahan platform serta ideologi individu dan menekankan bahwa sebenarnya elit telah melakukan hijrah. Meskipun apabila dikembalikan pada maknanya, hijrah merupakan suatu proses perpindahan kearah yang lebih baik. Sebagaimana peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya dari Kota Mekkah yang masih jahiliyah menuju ke Madinah yang sudah menerapkan Islam.

Sedangkan menurut HR Bukhari & Muslim menyebutkan, *"Dari Sahabat Umar bin Khaththab ra berkata, "Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda, 'Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya maka hijrahnya sesuai ke mana dia hijrah.'"*

Pada hadist di atas dijelaskan bahwa berpindahnya manusia untuk menjadi labih baik harus di dasari dengan niat untuk kepentingan yang dirinya ucapkan. Hadist tersebut dapat kita lihat bahwa ketika elit berpindah, maka berpindahnya dengan sepenuhnya dan seluruhnya. Tidak diperkenankan untuk kembali ke masa dimana elit telah melakukan kesalahan. Setidaknya pilihan politiklah yang dapat merubah perilaku elit untuk berpindah, mengamankan posisi untuk kepentingan individu.

Hijrah politik memang menjadi tradisi bagi politisi pragmatis. Selain hijrahnya untuk kebaikan posisinya, elit berpindah juga harus handal dalam melakukan lobi-lobi politik. Pada pemilu 2019 lalu, kita melihat bahwa partai Hanura yang mendukung koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin, tidak dapat masuk ke dalam parlemen dikarenakan perolehan suaranya kurang dari ambang batas yang ditentukan sebesar 4 %. (Kompas, 2019) Dalam etika politik yang ada, harusnya Wiranto tidak mendapatkan jatah ada di dalam kekuasaan pusat. Namun yang terjadi pada saat ini dirinya menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. (Detik, 2019)

Selain itu yang nampak sekali adalah bergabungnya Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto menjadi menteri Pertahanan di kabinet Jokowi periode kedua. Ditambah lagi dengan jatah menteri kelautan dan perikanan yang diberikan kepada Edhie Prabowo. (Liputan6, 2019) Melihat kenyataan yang demikian, masyarakat melihat bahwa berpindahnya arah koalisi non pemerintahan untuk bergabung

mendukung pemerintah rupanya menciptakan polarisasi baru. Tidak selamanya oposisi terus berada dalam luar pemerintah, justru saat ini berada di dalam pemerintah atau dengan kata lain bergabung dengan koalisi. Hijrahnya oposisi menuju koalisi menekankan bahwa ideologi politik dapat dikaburkan ketika kepentingan politik yang menjadi tolok ukur utama. Pragmatisme politik yang dibangun oleh salah satu kubu menegaskan pembangunan bangsa dan negara lebih di utamakan daripada konflik kepentingan yang mendominasi dengan pembenaran-pembenaran alternatif yang muncul dikarenakan fanatisme pendukung terlalu mempertontonkan simpati publik tentang siapa yang tersakiti dan menyakiti.

Dalam penggalan kalimat yang diungkapkan oleh Kanselir German, Otto von Bismarck "*Politics is the art of possible*", dikatakan bahwa politik adalah seni untuk memperhitungkan semua kemungkinan. Ungkapan ini seakan dapat menggambarkan perilaku elit saat ini Banyaknya elit yang berpindah-pindah dari partai, dukungan, dan platform ideologi. Kegiatan politik adalah mekanisme hitung-hitungan untung rugi, tentang sebuah kalkulasi kepentingan. Berupaya untuk bagaimana mengupayakan kepentingannya supaya dapat terwujud.(Aslan & Tasdemir, 2009)

Hijrahnya elit politik harusnya membutuhnya pola matematika. Namun, pola matematika politik bukan perhitungan yang mutlak, kadang bahkan politisi tidak pernah berhitung untuk berpindah baju partai. Dalam sirkulasi elit yang saling berpindah, mobilisasi massa yang berganti kepentingan dengan kebutuhan partai politik juga tidak dapat dikesampingkan. Sehubungan dengan fenomena itu, Pareto menjelaskan bahwa setiap masyarakat manapun, elit secara berkesinambungan melakukan upaya perubahan didalam kelas-kelas dan posisi, dimana dirinya berada. (Hagopian, 1978) Dari pendapat ini dapat dijelaskan bahwa sebenarnya elit yang berhijrah, juga membentuk pertukaran sosial dikalangan kelas-kelas lainnya.

Berbeda dengan konsep politik hijrah Kartosuwiryo, disaat tahun 1939 krisis politik di tubuh PSII makin memuncak, pemikiran ini ditolak oleh dewan partai. Dikarenakan kebijakan politik hijrah yang membuat ruang konflik. Dimana melibatkan dua tokoh utama partai, Abikusno dan Kartosuwiryo. Pada waktunya konflik itu menyebabkan hubungan keduanya retak. Di dalam agenda utamanya Kartosuwiryo konsekuen melaksanakan putusan Kongres PSII 1938, dimana keputusan hijrah telah disepakati. Namun disisi lain membuat Abikusno berbalik ke dalam garis parlementer dan bergabung dalam federasi politik nasional. Pemikiran Kartosuwiryo dapat dikatakan menjadi dasar perjuangan terhadap keimanan Islam. Keimanan dalam agama Islam

perlu diwujudkan dalam tatanan perilaku untuk dapat beribadah kepada ALLAH SWT. Dimana pada masa itu negara tidak menjamin tatanan yang Islami. (Suryana, 2019)

Aktualisasi pemikiran politik hijrah Kartosuwiryo di wujudkan dalam persiapan sumber daya manusia yang dapat mendukung cita-cita dan keinginan terbesarnya pada waktu itu. Yaitu membangun gerakan yang di dasarkan atas nilai-nilai keislaman. Berbanding terbalik dengan hijrah politik yang melanda kaum elit saat ini. Gerakan-gerakan yang dibangun bukan di dasarkan pemahaman agama, namun pada kepentingan dan kebutuhan yang utama.

Moral serta Etika Politisi

Pola hubungan tradisi hijrah politik pada pemahaman etika moral politik para elit tentu menunjukkan citra yang berbeda. Secara aturan kelembagaan negara kita yang menganut trias politika, elit politik yang berada di dalam parlemen memiliki tiga fungsi strategis, sebagai pembuat kebijakan yang mengharuskan elit untuk dapat merumuskan kebijakan-kebijakan yang memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Sebagai seorang penyusun kebijakan, peraturan yang baik lahir dari pemikiran serta disusunnya legal drafting yang baik pula. Mekanisme ini yang harus dipenuhi elit parlemen untuk dapat menyuarakan kepentingan rakyat. Dan yang utama elit parlemen harus mampu menjadi narahubung antara negara dan rakyat. Jangan sampai informasi dan kebutuhan rakyat menjadi tumpang tindih. Perilaku elit masa kini menunjukkan penurunan etika dan moral, terlebih ucapan-ucapan yang dimunculkan pada saat di media kurang menunjukkan siapa elit tersebut. Karena etika politik yang dibangun bahwa setiap anggota partai politik yang berhadapan langsung dengan media dan mewakili partai harus tunduk dan patuh pada aturan yang disepakati. Ini ditunjukkan pada debat kampanye yang ada di salah satu televisi tentang siapa yang membela pemerintah dan siapa yang membela oposisi. Kasus yang ramai terjadi di media menyangkut persoalan kubu pemeritah dan oposisi ditunjukkan dalam skema saling tuding menuding dan saling lapor melapor. (MediaIndonesia, 2019) Perilaku ini menunjukkan bahwa kebenaran yang ada dalam politik menjadi bias. Dimana perspektif hukum menjadi jawaban atas rasionalitas politik yang dimunculkan kedua kubu. Model kampanye elit yang membuat informasi palsu membuat masyarakat semakin menurutkan kepercayaannya.

Ketokohan elit yang populis telah membuat banyaknya elit yang berhijrah politik. Banyak partai politik yang berebut hati masyarakat dengan branding para *publik figure*

dan elit populis. Semuanya berlomba untuk mendapatkan simpati rakyat. Dalam perdebatan teoritis, populisme dipandang sebagai konsep yang mengalami ambiguitas, elusif dan tumpang tindih. Kompleksitas populisme disebabkan karena kurangnya konseptualisasi ide dan cenderung lebih banyak memahami dari lensa perbandingan atas banyaknya kasus-kasus global. Semua itu dipandang dalam berbagai sudut pandang dan kepentingan.(Patten, 2001)

Publik figur yang populis dalam keikutsertaannya pada kontestasi politik, sebenarnya juga berhitung. Mayoritas masyarakat yang mengetahui popularitasnya kadangkala bukan berada di daerah yang menjadi dapil dimana dirinya akan mencalonkan diri. Pendekatan diskursif Ernesto Laclau yang menekankan pada konstruksi politik. Membentuk adanya penyatuan "tuntutan/aspirasi'' yang sama dari masyarakat yang berlatar belakang berbeda. Pandangan ini menunjukkan bahwa elit politik harus responsif terhadap tuntutan masyarakat. Dimana kesamaan simbolik antar rakyat melalui proses politik harus sejalan dengan agenda politik.(Benvenuto et al., 2012)

Perbedaan tuntutan serta perilaku politik dalam proses pertukaran sosial di masyarakat menyebabkan adanya distorsi informasi publik. Fakta sosial yang ada menjelaskan bahwa perilaku elit memiliki perbedaan kepentingan yang beragam dengan tuntutan rakyat. Pilihan politik elit tidak dapat disatukan, dipaksa dan diharuskan seragam. Posisi inilah yang sering membuat elit merasa tidak mendapatkan simpati pemilihnya. Ketika pemilih mengikuti logika yang penuh dengan informasi elit dan kemudahan mengaskses platform media digital. Kesadaran politik akan terbentuk begitu saja. Media informasi menyederhanakan program demokratisasi sehingga persepsi aksessibiltas yang bebas di wujudkan dalam bentuk pertarungan konten politik di media. Fenomena ini bukan hanya tentang pertarungan konten politik, tetapi juga bagaimana membentuk pandangan masyarakat yang bentuknya hanya sebagai wacana.

Konten politik yang digunakan sebagai bahan media kampanye membuat kebangkitan pragmatism politik mulai mendominasi dan menjadi strategi utama para elit. Perilaku yang terjadi menunjukkan bahwa rasionalitas elit dalam menggunakan konten politik yang pragmatis lebih cenderung menuju arah *post-democracy*. Kondisi ini selain digambarkan dalam perilaku elit, juga dalam konten politik yang dibingkai sebagai wujud kepentingan rakyat. Padahal tujuan utamanya untuk melanggengkan kekuasaan politiknya. Keterkaitan elit popular dengan konten media yang pragmatis dapat menjadi landasan mengetahui tradisi elit yang berpindah. Dimana kebangkitan

populisme terhadap dinamika politik *electoral* serta tindakan elit menjelang pemilu dapat mendongkrak popularitas suara elit di dapilnya.

Pada masa sekarang ini politik dilihat sebagai produk mendapatkan kekuasaan demi terwujudnya keinginan beberapa pihak. Saat ini partai politik mengunakan keilmuannya hanya untuk menciptakan pola kekuasaan yang tersegmen pada legitimasi rakyat. Ideologi yang ditawarkan hanya pada saat hajatan rakyat begitu dilematis ketika media menggambarkan tentang betapa hancurnya moral dan etika para elit politik. Penguatan citra populis dalam persaingan popularitas yang dianggap sebagai motif utamanya. Tentang elit berpindah partai untuk kepentingan rakyat, namun kepentingan partailah yang menjadi tujuan utama. Memanipulasi pikiran masyarakat untuk memenuhi kemauannya serta partai yang menjadi platform.

Populisme gaya Jokowi contohnya, *blusukan* yang awal mulanya hanya sebagai gaya politik membentuk legitimasi masyarakat dalam upaya menegaskan kekuasaan elit. Pemimpin populis tersebut yang seperti inilah di rasa masyarakat dekat pemimpin. Berkaitan dengan kondisi ini, masyarakat sebenarnya dilema apakah model gaya politik yang sederhana dapat meningkatkan popularitas. Identitas sebagai instrument politik utama nyatanya lebih berpengaruh. Meskipun sebagai langkah pragmatis dalam menegaskan kekuasaan. Strategi politik ini mampu membentuk *frame* masyarakat akan kebutuhan elit. Inilah yang memaksa para elit-elit politik pramatis mengikuti gaya politik yang semacam itu. Melakukan tindakan yang sederhana dengan *frame* menyentuh sehingga menimbulkan perasaan simpati masyarakat.

Titik balik elit pragmatis di Indonesia pada akhirnya ditandai dengan kurangnya penguatan identitas yang menyebabkan polarisasi kekuasaan tidak menyeluruh. Melihat tradisi elit dalam asumsi *elite adjustment*,(Permana, 2017) memberikan pemahaman bahwa strategi politik yang harus dilakukan oleh para elit disesuaikan dengan tren pemilih yang ada di Indonesia. Dimana aspek religious menjadi salah satu dasar dipilihnya seorang elit. Sebagaimana ini terjadi dalam taktik Prabowo dengan narasi politik identitas yang menempatkan Jokowi dan partai pendukungnya ke dalam skema antagonis yang begitu dibenci oleh masyarakat Islam. Seperti yang di muncul di beberapa laman berita nasional Tempo (Selasa, 12 Maret 2019 14:30 WIB) seorang politisi senior, Amien Rais Sebut Malaikat Doakan Jokowi Kalah di Pilpres 2019. *“”Tiap malam (malaikat) lapor kepada Allah, ‘Ya Allah, Indonesia itu punya potensi bagus, tapi pimpinannya ugal-ugalan. Tolong ya Allah, kalahkan, tentukan kalah’,”.* (IslamiCo, 2019) Strategi politik semacam inilah yang membuat kegaduhan.

Mencoba memobilisasi politik identitas dengan rasionalitas elit yang bersifat *hoaks*. Inilah narasi politik yang bernuansa pragmatis di era pasca kebenaran.

KESIMPULAN

Platform partai politik pernah begitu mendominasi kehidupan dan kontestasi politik Indonesia. Hal ini terlihat dari polarisasi kekuasaan yang cenderung menjadi relasi pemerintah atau sebut saja koalisi. Partai politik tidak lepas dari ideologi yang membentuk serta membangun kerja para elit politiknya. Namun seiring berjalannya waktu, identitas kepartaian yang seharusnya melekat saat ini sering mudah hilang dan berpindah. Model seperti itulah yang dikatakan sebagai bentuk politik pragmatis.

Tulisan ini berusaha menunjukkan bagaimana rasionalitas politisi untuk menegaskan kekuasannya melalui politik pragmatis. Pada tingkat pemikiran elit, pragmatism politik dilakukan dengan berpindahnya elit mendekati tokoh populis untuk meningkatkan popularitasnya. Dimana perilaku ini dikatakan sebagai bentuk menjilat kekuasaan. Dibuktikan fenomena yang terjadi, adanya narasi-narasi yang telah menjadi kegaduhan politik, menyebabkan masyarakat akar rumput menjadi begitu resah. Beragam strategi elit dengan memanfaatkan figure populis menjadi situasi yang sah-sah saja digunakan. Meskipun dalam dinamika elektoral terbukti efektif untuk meraup suara serta memenangkan pemilu. Hilangnya identitas politik para elit menunjukkan betapa mudahnya elit berhijrah. Asumsi ini di dasari pada penggunaan politik pramatis yang populis dengan kombinasi permasalahan sosial. Semua itu di masukkan kedalam artikulasi visi misi, tindakan, serta aliansi politiknya guna menyesuaikan dengan selera pemilih. Karakteristik itu menguatkan bahwa elit politik saat ini mengalami kemunduran.

Implikasi dari kondisi ini menunjukkan bahwa rasionalitas elit cenderung mengarahkan elit untuk dekat dengan kekuasaan populis. Dimana ini berdampak pada dipujanya sosok pemimpin yang dapat menarik simpati pemilih. Hal ini akan berdampak pada rendahnya daya nalar masyarakat untuk mengkritisi produk para elit. Kemampuan elit untuk membuat konten misalnya, menciptakan partikularisme narasi sehingga memungkinkan adanya kebohongan dalam menangkap realitas objektif di masyarakat.

Isu-isu politik yang digunakan sebagai strategi dari kelompok elite kepentingan juga turut berperan penting dalam membentuk identitas politik para elit. Dari sinilah rasionalitas elit juga turut diperhatikan. Selain berpindah menjadi tradisi elit saat

pemilu. Elit politik dihadapkan pada dua pilihan, membentuk identitas sesuai dengan ideologi murni atau mengikuti arahan elit penguasa untuk mengamankan kekuasaannya.

Dalam memahami politik pragmatis era pasca kebenaran, tampaknya sangat membutuhkan analisa mengenai kecenderungan elit dalam perilaku sosial politiknya. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa politik era pasca kebenaran mengancam demokrasi di Indonesia. Banyak sebenarnya yang dapat dijelaskan dari fenomena hijrahnya elit politik. Sebagai bentuk tradisi elit atau bahkan hanya sebatas strategi menegaskan kekuasaan. Karena dengan berpindahnya elit dari dua kepentingan yang berbeda dapat menciptakan pergeseran politik nasional dan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Warson Al Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997)

Ar-Rāghib Al-Asfahānī, Mu'jam Mufrodāt Li Al-Fāzh Al-Qur'ān, (Beirūt: Dār Al-Fikr, 2008)

Arthur W. Burk, *The Collected Papers of Charles Sanders Pierce*, Vol. III, (Cambridge,Harvard University Press, 1958), 116.

Aslan, M., & Tasdemir, M. (2009). Is Fiscal Synchronization Hypothesis Relevant for Turkey? Evidence from Cointegration and Causality Tests with Endogenous Structural Breaks. *Journal of Money*.

Benvenuto, S., Howarth, D., & Norval, A. (2012). *On Populist Reason by Ernesto Laclau*. 633–646.

Choiriyati, W. (2018). MANIFESTASI PRAGMATISME PENDIDIKAN POLITIK (Analisis Resepsi pada Komodifikasi Berita Selebriti Politisi). *LUGAS Jurnal Komunikasi*, *1*, 40–54. https://doi.org/10.31334/jl.v1i1.103

Farisi, M. (2017). *SIRKULASI ELIT POLITIK LOKAL PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2015 DI PROVINSI JAMBI*. 16.

Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*,(Yogyakarta: Kanisus, 1991), 122.

Fuad Mas'ud, *Menggugat Manajemen Barat*, Ed. II, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenegoro, 2015), 87.

Golose, P. R. (2019). *Strategi Penanganan Firehose of Falsehood pada Era Post-Truth*. *13*, 10.

Hadiz, V., & Robison, R. (2017). Competing populisms in post-authoritarian Indonesia. *International Political Science Review*, *38*, 488–502. https://doi.org/10.1177/0192512117697475

Harsin, J. (2015). Regimes of Post-truth, Post-politics, and Attention Economies. *Communication, Culture & Critique*, *8*. https://doi.org/10.1111/cccr.12097

https://nasional.kompas.com/read/2019/04/24/15524161/drama-politik-pascapilpres?page=all

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180809163733-32-320924/partai-pendukung-jokowi-deklarasikan-koalisi-indonesia-kerja

https://majalah.tempo.co/read/157570/presiden-republik-indonesia-joko-widodo-tugas-pemimpin-bukan-memanaskan-suasana&user=register diakses 23 Januari 2020

https://www.kompasiana.com/yupiter/5c93a36e7a6d88747d5fad24/ketika-perang-antar-lembaga-survei-pilpres-2019-dimulai?page=all

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190515063431-32-394946/budiman-sujatmiko-dan-dhani-gagal-ibas-melenggang-ke-senayan

https://beritagar.id/artikel/telatah/politikus-kutu-loncat-dan-dekadensi-politik-kita

https://www.voaindonesia.com/a/ppatk-temukan-modus-baru-politik-uang-dalam-pemilu-2019/4863564.html

https://nasional.kompas.com/read/2019/04/26/11271161/wiranto-jangan-menyalahkan-saya-hanura-tak-lolos-ke-dpr

https://news.detik.com/berita/d-4825934/wiranto-balik-ke-lingkaran-jokowi-ksp-wantimpres-butuh-pemikiran-wise

https://www.liputan6.com/news/read/4091880/prabowo-dan-edhy-ke-istana-gerindra-dapat-2-jatah-menteri

https://mediaindonesia.com/read/detail/215461-kubu-jokowi-prabowo-saling-tuding-dan-bantah-soal-konsultan-asing

https://islami.co/amien-rais-dan-politik-yang-baperan-hingga-mengajak-malaikat/ diakses 24 Januari 2019

Jinan, M. (n.d.). *Intervensi New Media dan Impersonalisasi Otoritas Keagamaan di Indonesia*. 28.

Khamim, A., & Sabri, M. (2019). Konglomerasi Media dan Partai Politik: Membaca Relasi MNC Group dengan Partai Perindo. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, *10*, 112. https://doi.org/10.14710/politika.10.2.2019.112-134

Mietzner, M. (n.d.). *Reinventing Asian Populism: Jokowi's Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia*. 91.

Ni'mah, M. (2016). TRANSFORMASI SELEBRITI MENJADI POLITISI: URGENSI PERSONAL FRONT DALAM RANAH SOSIAL. *INFORMASI*, *45*, 141. https://doi.org/10.21831/informasi.v45i2.7989

[No title found]. (n.d.). *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, *05*(1).

Patten, S. (2001). Populism by Paul Taggart. *Labour / Le Travail*, *48*, 334–336. https://doi.org/10.2307/25149197

Permana, P. (2017). *Local elite adjustment in Indonesia's democratization: Case studies of North Sumatra and East Java, 1998-2013*.

Ronald, I., & Norris, P. (2016). Trump, Brexit, and the Rise of Populism: Economic Have-Nots and Cultural Backlash. *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.2818659

Susanti, M. (2018). Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, *1*, 111. https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440

Toive Aartolahti, dkk, *Grolier: Encyclopedia of Knowledge*, Vol. XV, (United States: Acamedic American Encyclopedia, 1997), 173.

Yunus, N. R. (n.d.). *Etika dan Moralitas Politik Anggota Dewan*. 21.

Zaprulkhan, *Filsafat Ilmu: Sebuah Analisis Kontemporer*, Ed. I, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. III, 2016), 116.